

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berupa Republik. Yang kedua dijelaskan didalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945² mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah – daerah propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap propinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan undang – undang. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang telah dijelaskan dan tercantum didalam pancasila dan UUD 1945 memberikan upaya yaitu dengan cara meningkatkan pembangunan nasional lewat pembangunan yang berkesinambungan.

Terdapat beberapa masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi oleh suatu negara, diantaranya; masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, sehingga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran suatu negara. Negara Indonesia tengah mengalami masalah sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan persoalan kemasyarakatan yang sering terjadi disuatu negara atau daerah dimana

² Supriadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilafah di Kota Palopo”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 1

adanya ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari diantaranya kebutuhan rumah tangga, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan jasmani.³ Sedangkan menurut teori yang dikemukakan Union dalam buku Bhinadi⁴ dimana Union mengatakan bahwa :

Kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumber daya (Material, Sosial dan Budaya) yang sangat terbatas. Penyebab adanya kemiskinan karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk disuatu wilayah, pendidikan masih rendah dan masih adanya pengangguran.

Pemerintah sendiri sudah mengupayakan pengendalian atas kemiskinan semenjak tahun 1998 hingga sekarang, dan juga Indonesia menyusun strategi dan *program* untuk menuntaskan masalah yang ada di masyarakat (kemiskinan) di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur dengan melakukan peningkatan sumber daya manusianya dan peningkatan kinerja perekonomian supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkopeten sehingga akan tertatanya kehidupan masyarakat yang layak.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan, pembangunan sendiri yaitu proses perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan pada suatu tatanan masyarakat yang berguna untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵ Berbagai program dan kegiatan sudah dijalankan terutama kepada pembangunan daerah, khususnya didalam daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif

³ <http://www.tulungagung.go.id/diakses> 26 november 2020

⁴ Artdito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

⁵ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia*, (Jakarta: Erlangga. 2006), hal.179

tinggi. Sasaran dalam pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan pendek, dan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan nasional yaitu laju penurunan jumlah penduduk miskin.⁶ Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih optimal dan bisa menurunkan angka kemiskinan.⁷ Dan karena dirasa masih menjadi permasalahan yang cukup serius, yang ditandai dengan banyaknya penduduk yang masih kekurangan kebutuhan hidupnya, dan masih banyak masyarakat yang menganggur. Sehingga dapat ditandai bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius agar terselesaikannya masalah sosial kemiskinan ini karena menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur	Tingkat Penduduk Miskin (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	8,9	8,3	12,34	12,05	11,77	10,98	10,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur⁸

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur apabila diamati dari tahun 2013 sampai dengan 2019

⁶ Dermoredjo, "Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan", *Jurnal Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, 2003, hal 291-324. Dalam <http://www.lpem.org>, diakses 26 November 2020.

⁷ Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia.....*, hal.180

⁸ <http://www.BPS.go.id>/diakses 26 November 2020

mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota dari tahun 2013-2019. Besaran warga kurang mampu yang ada di Provinsi Jawa Timur periode dari 2013 – 2019 dapat dilihat bahwa pergeseran jumlah penduduk miskin dalam keadaan dua tahun terakhir dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 8,9% menjadi 8,3% di tahun 2014, namun pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan cukup besar yaitu 12,34% namun dalam tahun 2016 sampai di tahun 2019 mengalami penurunan yang awal mula pada tahun 2016 sebesar 12,05% menjadi 10,37% ditahun 2019.

Dengan ini akan menjadi indeks keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun seringkali menghadapi beberapa rintangan diantaranya dari pengangguran, jumlah penduduk, tingkat pendidikan yang masih rendah.

Permasalahan kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang pertama yaitu pengangguran. Menurut Sukirno⁹ bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran yaitu tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terealisasi, sehingga apabila tidak bekerja atau pengangguran maka akan mengurangi pendapatan dan tingkat kemakmuran yang mereka capai, maka akan dapat menimbulkan

⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 29

rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terdapat hubungan antara kemiskinan dengan pengangguran yaitu semakin banyak taraf pengangguran maka akan meperburuk dan menurunkan ketentraman masyarakat, dikarenakan¹⁰ standar hidup yang rendah Pengangguran memang masih menjadi masalah yang serius, hal tersebut dapat dikaitkan dengan kemiskinan, semakin tinggi angka pengangguran maka semakin tinggi pula kemiskinan, sebaliknya apabila pengangguran mengalami penurunan tingkat kemiskinan juga ikut turun. Upaya menurunkan pengangguran dan kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik maka tidak akan ada masyarakat yang kekurangan akan kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan dengan tingkat pengangguran yang rendah maka kemiskinan juga akan rendah.¹¹

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013– 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pengangguran Terbuka (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.30	4.19	4,47	4,14	4.00	3,99	3.92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur¹²

¹⁰ Alfi Amalia, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara”, *At – Tawassuth*, Vol. III, No. 3, 2017, hal. 328 – 329

¹¹ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal EKSOS*, Vo. 8 No, 3 Oktober 2012, hal. 176-185

Dapat dilihat didalam tabel 1.2 diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota mengalami terjadi penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2019, mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, dimana ditahun 2013 sebesar 4,30% dan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,19%, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,47% dan di tahun 2016-2019 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,21% menjadi 3,92% ditahun 2019. Semakin banyaknya penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran maka akan semakin banyak masyarakat yang terjebak dalam lubang kemiskinan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan satu aset masa depan bangsa dan negara. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan bermanfaat untuk digunakan di dunia kerja. Beberapa tahn yang lalu pendidikan diwajibkan selama 12 tahun atau sampai sekolah menengah atas, namun sekarang pendidikan dikembangkan hingga pendidikan tinggi. Dalam hal ini diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹² Menurut Edgar Dalle, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat

¹² <http://www.BPS.go.id/> diakses 26 November 2020

¹³ Amos Neolaka dan Grace Amalia A Neolaka, *Landasan Pendidikan : Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 11.

untuk mempersiapkan apabila didalam dunia pendidikan dirasa sangat buruk maka dapat dipastikan masa depan suatu negara juga semakin terpuruk, sebaliknya apabila pendidikan kian maju dan berkembang dengan baik maka masa depan negara dan anak bangsa akan cemerlang. Karena pendidikan merupakan suatu faktor terpenting dalam memperbaiki suatu negara. Biasanya masyarakat miskin banyak mengalami kebodohan atau keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan karena kurangnya mendapat pendidikan. Tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat diukur dengan besarnya angka melek huruf.

Tabel 1.3 Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur	Jumlah Angka Melek Huruf (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	90.49	92.23	92,30	91,59	93,87	92,56	92,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur¹⁴

Dapat dilihat didalam tabel 1.3 tersebut menunjukkan tingkat Pendidikan dengan menggunakan data angka melek huruf di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dimana ditahun 2013 tingkat angka melek huruf Provinsi Jawa Timur sebesar 90,49% pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dengan jumlahnya yaitu 92,23% dan 92,30% sampai tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 91,59%, pada tahun 2016 ke 2017 sebanyak 93,87% mengalami kenaikan, ditahun 2017 ke 2018

¹⁴ <http://www.BPS.go.id/Prov.Jatim/diakses> 04 Oktober 2020

sebanyak 92,56% mengalami penurunan dan ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 92,99%.

Jumlah penduduk merupakan perhitungan warga negara didalam suatu daerah dengan cara cacah atau sensus. Jumlah warga negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu persoalan yang telah ada di pemerintahan.¹⁵ Pemerintah mengantisipasi pertumbuhan penduduk secara cepat menggunakan cara merencanakan *program* KB (Keluarga Berencana) dimulai sejak 1970¹⁶. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan masalah kemiskinan. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk dapat mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga akan mengakibatkan terciptanya kemiskinan yang cepat.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penduduk (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	38363	38610				39 500	
	1	2	3884756	390751	392929	85	39 698 6
	9	0	1	52	72	1	31
	5	2					

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur¹⁷

Dapat dilihat dari tabel 1.4 diatas jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, ditahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 38.363.195 ribu jiwa, tahun 2014

¹⁵ Riska Rosyda Putri, *Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Angka Buta Huruf dan Pengangguran Terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 23

¹⁶ <http://www.BPS.go.id/> diakses 04 Oktober 2020

¹⁷ <http://www.BPS.go.id/Prov.Jatim/> diakses 04 Oktober 2020

sampai ditahun 2019 terus mengalami kenaikan sebesar 39.698.631 ribu jiwa di tahun 2019.

Alasan penulis meneliti di Provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota karena tingkat kemiskinan diwilayah Jawa Timur masih belum stabil belum sepenuhnya mengalami penurunan. Dan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat padat sehingga akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan memicu adanya kemiskinan. Selain itu masih kurang meratanya pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkopeten dan berkualitas. Dengan begitu perlunya upaya pemerintah dalam penuntasan kemiskinan dengan menambah lapangan pekerjaan agar berkurangnya tingkat pengangguran, melakukan program Keluarga Berencana agar jumlah penduduk tidak meningkat secara drastis, dan mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan bahwa pendidikan sangat penting dengan begitu banyak SDM yang berkualitas, sehingga dengan begitu tingkat kemiskinan akan semakin menurn setiap tahunnya. Dengan demikian bersumber pada penjelasan dan informasi data yang diuraikan peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan selama tahun 2013-2019 di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Sehingga terdapatnya faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.
2. Tingkat pengangguran selama tujuh tahun terakhir (2013-2019) di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi, sehingga pengangguran sendiri dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, semakin tinggi pengangguran semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, apabila pengangguran mengalami fluktuasi maka kemiskinan juga dapat mengalami fluktuasi.
3. Tingkat pendidikan selama tahun 2013-2019 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan seseorang yang dapat menyebabkan berkurangnya pengetahuan dan ketrampilan, sehingga meningkatkan pengangguran dan kemiskinan
4. Tingkat jumlah penduduk selama tahun 2013-2019 menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
2. untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3. untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
4. untuk menguji pengaruh signifikan secara bersama-sama pengangguran, tingkat pendidikan, jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. **Secara Teoritis** : sebagai sumbangsih pemikiran terhadap kajian ilmu di bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Pembangunan
2. **Secara Praktis** :
 - a. Bagi Lembaga : sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengambilan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - b. Bagi Akademik : sebagai sumbangsih perbendaharaan perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
 - c. Untuk penelitian selanjutnya : sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar efektif dan efisien berguna untuk memisahkan aspek tertentu dalam objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang telah diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengangguran (X_1), Tingkat

Pendidikan (X_2), Jumlah Penduduk (X_3), sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Tingkat Kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Namun juga meliputi terbatasnya variabel makroekonomi yang menjadi indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat agar terjadi perbedaan pemahaman dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing – masing variabel, sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari baik dari kebutuhan pokok dan kurangnya pendapatan yang dimiliki. Kemiskinan diberbagai negara ditandai dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, tidak tersedianya tempat tinggal, mengemis, tidak dapat mengenyam pendidikan, tidak mempunyai akses air bersih dan listrik. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan yaitu kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca tulis. Dan kemiskinan merupakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan, sehingga kemiskinan sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. menurut Marianti dan Munawar berpendapat bahwa kemiskinan merupakan multi dimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam hal ini kemiskinan telah diukur dengan termonologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi.¹⁸

b. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana masyarakat yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan

¹⁸ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), hal. 8-9.

pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Sukirno pengangguran merupakan seorang yang tidak bekerja, tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran yaitu dimana masyarakat yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja namun belum memulai bekerja.¹⁹

c. Pendidikan

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 Butir 1 (sebagaimana telah dikutip pada Bab XI) mengandung penegasan tentang muatan pendidikan, yaitu : pelaksanaan pendidikan diselenggarakan secara sadar dan terencana, pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, suasana belajar dan proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik.²⁰ Pendidikan secara umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang

¹⁹ Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hal. 22

²⁰ Preayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 385

diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD), dan 3 tahun di SMP atau satuan pendidikan yang sederajat²¹

d. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sekumpulan orang yang berdomisili di wilayah geografis Republika Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.²² Menurut Said penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses – proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.²³

2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengangguran, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat.

²¹ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 10

²² <http://Bps.co.id> diakses 03 Desember 2020.

²³ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, LP3S, 2012), hal. 136

Variabel bebas terdiri dari Pengangguran (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), dan Jumlah Penduduk (X_3), sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat Kemiskinan (Y).

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terhadap hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian; Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian; Sumber Data, Variabel, dan Skala

Pengukuran; Teknik Pengumpulan Data; serta Analisis Data.

4. BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Hasil Penelitian yang berisi Deskripsi Data dan Pengujian Hipotesis serta Temuan Penelitian.

5. BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

6. BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis